

## MODEL KEPEMIMPINAN PANCASILA DALAM MASYARAKAT PLURAL: SEBUAH KAJIAN PUSTAKA

**Andri Hernandi**

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB

Email: [andri\\_hernandi@yahoo.com](mailto:andri_hernandi@yahoo.com)

### Abstrak

*Kepemimpinan Pancasila merujuk pada konsep kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam kepemimpinan. Dalam konteks kepemimpinan Pancasila, pemimpin diharapkan mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Prinsip yang menjadi dasar kepemimpinan Pancasila harus sesuai dengan pengejawantahan dari sila-sila dalam Pancasila. Dalam artikel ini digunakan penelitian secara kualitatif dengan pendekatan tinjauan kepustakaan. Pertimbangan terhadap pendekatan penelitian ini karena setidaknya ada beberapa sumber data yang tidak dapat sepenuhnya diperoleh di lapangan, sehingga adakalanya sumber data hanya dapat di perpustakaan atau dokumen-dokumen lainnya yang berbentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur lainnya. Berdasarkan hasil tinjauan kepustakaan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Pancasila berupaya menciptakan kepemimpinan yang inklusif, adil, dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kepemimpinan Pancasila merujuk pada konsep kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, dasar negara Indonesia.*

**Kata kunci:** *kepemimpinan pancasila, identitas nasional, manifestasi pancasila*

### Pendahuluan

Kepemimpinan Pancasila merujuk pada gaya kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, kepemimpinan yang berbasis Pancasila sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas negara.

Kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila merupakan upaya membumikan Pancasila di pada semua organisasi/lembaga, baik ditingkat lokal, nasional, bahkan dunia. Kepemimpinan Pancasila tentunya harus dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara mutlak dan implementatif di tengah terbukanya tatanan global. Organisasi/lembaga sebagai tempat berkumpulnya orang mengemban tugas untuk mengukuhkan, memformulasikan, menyatukan, dan menciptakan masyarakat yang berasaskan Pancasila disetiap sendi-sendi kehidupan. Pimpinan organisasi/lembaga merupakan kunci utama dapat terwujudnya lingkungan dan budaya organisasi/lembaga yang Pancasila. Pimpinan dalam seluruh kegiatan memiliki kewajiban menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anggotanya, dengan memasukkan kandungan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan dan program organisasi/lembaga.

Menurut (Kariyadi & Suprpto, 2017), apabila mengacu pada sila-sila Pancasila, maka diperoleh beberapa hal penting terkait dengan pilar-pilar nilai kepemimpinan yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam setiap lembaga, antara lain, pertama transendensi, kedua humanisasi, ketiga kebhinekaan, keempat liberasi, dan kelima keadilan. Lima pilar nilai kepemimpinan Pancasila tersebut menjadi ruh kepemimpinan yang ditampilkan oleh pimpinan dalam memimpin ormas atau lembaganya. Jika pimpinan menampilkan sifat lima pilar kepemimpinan Pancasila dan juga. Bahkan menurut (Permady et al., 2021) bahwa karakter kepemimpinan Pancasila adalah seorang pemimpin yang menyelipkan nilai - nilai Pancasila seperti religius, beretika, dan bertanggung jawab dalam gaya kepemimpinannya, sehingga akan menarik pengikutnya tersebut yang setia memegang teguh nilai - nilai yang ditinggalkannya hingga generasi - generasi berikutnya.

Sebagai pedoman dalam kepemimpinan di masyarakat Pancasila juga menjadi pedoman dalam kepemimpinan di masyarakat, baik di tingkat nasional maupun lokal. Kepemimpinan yang berbasis Pancasila menekankan pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan persatuan, sehingga mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid dalam bukunya yang berjudul "Menggagas Indonesia Baru: Manifestasi Pancasila", "Pancasila adalah kunci dari keberhasilan bangsa Indonesia, dan kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama" (Wahid, 2003).

Sebagai identitas nasional Pancasila juga menjadi identitas nasional Indonesia yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Kepemimpinan yang berbasis Pancasila dapat menjadi representasi yang kuat dan konsisten dari identitas nasional Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, "Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila harus menjadi cerminan dari identitas nasional kita."

Tentunya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sangat ditentukan bagaimana seorang pemimpin dapat menginternalisasi dan mengeksternalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam konteks interaksi baik di internal organisasi/lembaga atau di tingkat eksternal sebagai dasar aktualisasi fraksi dari nilai-nilai tersebut. Namun, ketika organisasi/lembaga tanpa melakukan proses internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut, maka organisasi tersebut tidak akan menjalankan fungsinya sesuai dengan

Pemahaman tentang nilai tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana pemahaman seorang pemimpin tentang nilai itu terbentuk. Ada nilai yang diinginkan dan sangat diinginkan, dan dalam konteks interaksi dalam kelompok ada nilai yang tidak diinginkan karena tidak berkesesuaian dengan apa yang diharapkan. Jadi nilai adalah prinsip dasar yang menjadi pegangan setiap orang dalam hidup dan kehidupannya. Proses pembentukan nilai terjadi ketika interaksi antar manusia terjadi, dimana nilai dalam fungsi sehari-hari menjadi pedoman orang berperilaku dan mengarahkan orang untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika organisasi tanpa membentuk nilai yang menjadi pedoman bagi anggotanya, maka organisasi tidak akan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan serta akan terjadi kehilangan makna dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi target utamanya.

Berkaca dari permasalahan di atas, maka dengan asumsi penulis menjelaskan bahwa kepemimpinan yang berbasis kepada nilai-nilai Pancasila dalam organisasi/lembaga yang majemuk melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih dalam dan berupaya untuk meneliti makna dibalik itu. Atas dasar ini penulis mencoba untuk mengembangkan model kepemimpinan Pancasila dari beberapa aspek yang akan dikaji.

## Metode

Penulis dalam artikel ini menggunakan penelitian secara kualitatif dengan pendekatan tinjauan kepustakaan. Pertimbangan terhadap pendekatan penelitian ini karena setidaknya ada

beberapa sumber data yang tidak dapat sepenuhnya diperoleh di lapangan, sehingga adakalanya sumber data hanya dapat di perpustakaan atau dokumen-dokumen lainnya yang berbentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur lainnya. Menurut (Gill et al., 2008) bahwa studi pustaka merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang dapat digunakan dalam penelitian sosial. Diperjelas juga oleh pada buku yang ditulis oleh (Creswell, 2007) yang berjudul *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*, yang di review juga oleh (Sarfo & Ofori, 2017) bahwa penelitian secara kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dapat dilakukan dengan baik jika Peneliti membatasi penelitian di dalam asumsi dan karakteristik dari pendekatan kualitatif. Selain itu, menurut (Arshed & Dansen, 2015) menjelaskan bahwa penelitian secara kualitatif dengan pendekatan tinjauan kepustakaan itu untuk mendidik diri sendiri di bidang topik dan memahami kepustakaan sebelum membentuk argumen atau pembenaran. Diperjelas menurut (Creswell, 2015) bahwa tinjauan kepustakaan adalah rangkuman tertulis dari berbagai artikel jurnal, buku, dan dokumen-dokumen lain yang mendeskripsikan situasi informasi, jadi data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Oleh karena itu, dengan alasan tersebut, penulis menggunakan penelitian secara kualitatif dengan pendekatan tinjauan kepustakaan.

## Hasil dan Pembahasan

Pancasila memiliki dua nilai yang sangat luhur sebagaimana telah dideklarasikan oleh Presiden Ir. Soekarno, para pemimpin bangsa ini dan juga beliau yang telah sangat luhur budi pekertinya yang selalu memberikan dorongan, bimbingan pada Ir. Soekarno dan beliau juga yang telah merumuskan Pancasila sedemikian sempurna sebagai filsafat hidup sekaligus Idiologi bangsa yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang beragam ras, suku, adat istiadat, bahasa dan keyakinan dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika sebagai bangsa yang berdaulat, merdeka dan demokrasi yaitu Bangsa Indonesia (Riadi, 2006).

Kepemimpinan Pancasila merujuk pada konsep kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam kepemimpinan. Dalam konteks kepemimpinan Pancasila, pemimpin diharapkan mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beberapa prinsip yang menjadi dasar kepemimpinan Pancasila antara lain (Riadi, 2006; Tambunan, 2018):

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Pemimpin harus memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati keragaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memastikan kebebasan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi semua warga negara.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Pemimpin diharapkan bertindak adil, menghormati hak asasi manusia, serta memperhatikan kesejahteraan dan martabat setiap individu dalam masyarakat.
3. Persatuan Indonesia: Pemimpin harus mampu membangun persatuan dan kesatuan di tengah keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia, serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Pemimpin harus melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme perwakilan dan musyawarah, serta mengedepankan kebijaksanaan dan kepentingan bersama.  
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Pemimpin diharapkan mendorong pemerataan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut (Riadi, 2006) bahwa kepemimpinan Pancasila bahwa setiap pemimpin harus berpikir dan berusaha menggunakan akal pikiran budi pekerti serta daya upayanya, untuk

menggunakan segala miliknya dan mengabaikan rasa perasaan serta sentimental untuk dapat meletakkan dasar yang mendasari manusia baik hubungan kepada Tuhan (Makrokosmos) dan hubungannya kepada sesama manusia, alam semesta beserta seisinya sebagai bentuk interaksi positif pada alam sekitarnya (Mikrokosmos). Dari asas manusia diatas, sudah sangat tepat kiranya kalau pemimpin Pancasila akan mengangkat kembali nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sebab menurut analisa sudah sangat tepat apabila Pancasila dijadikan ideologi, iegangan hidup, etika tingkah laku bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, adat istiadat, bahasa, budaya dan keyakinan. Kepemimpinan Pancasila harus mencerminkan bahwa dasar kepemimpinan baik itu organisasi/lembaga untuk berhubungan secara Makrokosmos dan Mikrokosmos harus menjad asas dasar keimanan bangsa Indonesia. Inilah makna dari sila Ketuhanan yang Maha Esa, sifatnya Tuhan bersama dalam kepemimpinan Pancasila. Nilai-nilai yang tertanam dalam pancasila dan merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia, baik kekayaan kerohanian, kepribadian serta wawasan kebangsaan yang terpendam jauh dalam sejarah. Oleh karena itu, ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku ketua Badan dan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, para pendiri negara berusaha melihat dan menerobos jauh kebelakang hingga kejayaan Nusantara dan atas pengajuan Ir. Soekarno pada waktu itu terbentuklah rumusanrumusan pancasila yang pada puncaknya disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 (Latif, 2011).

Pancasila menunjukkan agar pemimpin Indonesia menjadi pemimpin yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pemimpin Indonesia harus mengenali dirinya sendiri sebagai dasar (pondasi) untuk bisa mengenal Tuhannya, dan mengabdikan dirinya pada Tuhan serta berinteraksi dengan alam semesta seisinya. Umat manusia yang ingin menyatukan dirinya dengan Tuhan, dia harus menjalankan hidupnya sebagai manusia seutuhnya yang diberi kesempurnaan. Kepemimpinan Pancasila harus dapat mengutamakan kebersamaan, keselarasan/kesejahteraan dan kedamaian hidup serta kelangsungan hidup, penghidupan maupun kehidupan manusia (umat) secara berkesinambungan serta turun-temurun dengan mengutamakan rasa sebagai manusia (rasa manusiawi) baik terhadap diri/hidup manusia itu sendiri maupun dengan sesama hidupnya dan alam semesta seisinya untuk saling menjaga serta melestarikan dalam hubungan/interaksi hidup sesuai hukum kodrat dan iradat Tuhan Yang Maha Esa dan hukum Nyakra Manggilingan sebagai wujud dari kepemimpinan yang menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam konteks sila persatuan Indonesia, kepemimpinan Pancasila mempunyai tujuan tercapainya satu kehidupan yang madani, rukun, aman, bersatu, sejahtera, adil dan merata. Esensi dalam kepemimpinan Pancasila bahwa persatuan sendiri bukan berarti mempersatukan perbedaan, keragaman menjadi satu warna, satu bentuk tetapi persatuan lebih menitik beratkan pada persatuan rasa sebagai manusia yang selalu menjunjung tinggi dan menghormati harkat, derajat, martabat serta hak-hak asasi manusia. Kalau persatuan mengarah pada penyatuan bentuk, penyeragaman baik itu bentuk, rona, rupa dan jenis yang terjadi malah akan berbenturan dan tidak selaras yang akan menimbulkan dilema masing-masing yang akhirnya akan memecah belah persatuan itu sendiri. Kepemimpinan Pancasila akan menghindari keputusan dominasi mayoritas, yang dapat berujung pada penyeragaman sepihak tanpa melihat aspek-aspek yang mendasar dan merendahkan serta tidak menghormati harkat, derajat, martabat dan hak-hak asasi manusia. Kepemimpinan Pancasila memberikan pemahaman bahwa persatuan yang hakiki yaitu persatuan asas dan tujuan yang didasarkan pada rasa yang manusiawi yang berpegang pada rasa Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kepemimpinan Pancasila yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab yang penuh cinta kasih secara sistematis dan demokratis akan mencapai kehidupan yang adil sejahtera disegala aspek kehidupan dan damai bersatu sesuai fungsi sosial masing-masing serta menjunjung tinggi derajat, martabat dan hak-hak asasi manusia serta tidak mengurangi arti persatuan itu sendiri.

Selain itu, kepemimpinan Pancasila dalam konteks sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjelaskan bahwa pemimpin harus dapat yaitu menciptakan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada asas

kerakyatan, asal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang segala sesuatunya didasarkan pada permusyawaratan perwakilan, asas musyawarah mufakat. Dalam pada itu kerakyatannya, yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam bahasa yang lebih maju lagi dikatakan sosio demokrasi. Kehidupan suatu bangsa, negara ini merupakan kehidupan sosial yang majemuk, untuk mencapai persatuan dan keselarasan atas kehidupan sosial yang majemuk itu harus menganut asas demokrasi, yaitu demokrasi kerakyatan, bukan demokrasi yang kebablasan, liberalisme, birokratisasi dan segala macam jenisnya. Untuk itu sangat penting kiranya sebelum manusia, bangsa dan negara menjalankan asas demokrasi secara umum / luas, ada baiknya melaksanakan dalam diri pribadi seorang pemimpin itu sendiri. Agar setiap manusia, lapisan masyarakat, bangsa dan negara mengetahui dan bisa melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya masing-masing dalam kehidupan sosialnya itu. Pelaksanaan asas demokrasi dalam diri ini, diharapkan bisa membentengi diri dan menjadi dasar hidup yang kokoh untuk melaksanakan demokrasi kerakyatan secara menyeluruh bahkan mendunia. Menurut (Rosi et al., 2021) dalam demokrasi pancasila tidak hanya terdapat pelaksanaan sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat akan tetapi masih ada integrasi dengan kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk bisa mencapai kepemimpinan Pancasila dalam konteks sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan masyarakat dunia harus didasari dengan pondasi yang kuat dan kokoh, yang dibangun atas dasar rasa kebersamaan, kerukunan dan gotong royong, yang dibangun atas dasar bhinneka tunggal ika, dibangun atas keragaman dan perbedaan serta keadilan itu sendiri. Keadilan sosial harus dibangun diatas dasar adil yang beragam itu, bukan penyeragaman atau penyatuan rupa ataupun jenis. Keadilan sosial adalah suatu wujud Keagungan Tuhan Yang Maha Esa dan wujud keadilanNya. Bahwasanya manusia di muka bumi ini tidak ada yang sama bentuk, rupa ataupun ronanya, sekalipun kembar tetap ada yang berbeda. Inilah kenyataan wujud adilnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari segala perbuatan, darma atau karma perjalanan hidup umat/makhluk tergantung pada darma dan karmanya itu pula, karena ini merupakan kodrat, hukum keadilan dan kuasaNya Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya siapa menanam padi, maka akan tumbuh dan panen padi, ini adalah adil yang merupakan kodrat, untuk itu jalankan perjalanan hidupmu sesuai kodrat dan iradatnya Tuhan Yang Maha Adil. Berbudi dan berdayalah selayaknya wujud dan rasamu sebagai manusia, supaya benar kodratmu. Keadilan sosial sifatnya juga welas dan asih, artinya keadilan yang menyeluruh, yang mengangkat derajat dan martabat serta hak-hak asasi manusia, tidak membedakan ras, suku, golongan, keturunan, bahasa, budaya, keyakinan, bangsa dan negara. Oleh karena itu menurut (Bahder, 2014) bahwa keadilan adalah adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral.

Berdasarkan uraian model kepemimpinan Pancasila dalam konteks sila dalam Pancasila, dalam praktiknya, kepemimpinan Pancasila mengharuskan pemimpin untuk menjadi teladan yang baik, mengedepankan moralitas, integritas, kejujuran, dan keterbukaan. Pemimpin juga diharapkan memiliki wawasan luas, kepekaan sosial, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan mampu memfasilitasi dialog serta musyawarah untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi masyarakat. Kepemimpinan Pancasila berupaya menciptakan kepemimpinan yang inklusif, adil, dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

## **Simpulan**

Kepemimpinan Pancasila berupaya menciptakan kepemimpinan yang inklusif, adil, dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kepemimpinan Pancasila merujuk pada konsep kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam kepemimpinan. Kepemimpinan Pancasila butuh kebesaran hati, karena kepemimpinan pancasila merupakan model pemimpin yang dapat membuka pintu gerbang melaksanakan masyarakat untuk berbangsa dan bernegara yang mempunyai perbedaan dan keragaman hidup dan kehidupan serta penghidupannya



untuk mewujudkan kerukunan, keamanan, damai sejahtera, adil abadi merata, siang malam tiada henti sepanjang jaman dan sepanjang masa.

### Daftar Pustaka

- Arshed, N., & Dansen, M. (2015). The Literature Review. In K. D. O'Gorman & R. MacIntosh (Eds.), *Research Methods for Business and Management* (2nd ed.). Goodfellow Publishers. <https://doi.org/10.23912/978-1-910158-51-7-2790>
- Bahder, J. N. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches* (Second Edition). Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2015). *Riset Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews and Focus Groups. *British Dental Journal*, 204(6), 291–295. <https://doi.org/10.1038/bdj.2008.192>
- Kariyadi, D., & Suprpto, W. (2017). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 86. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1560>
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Kompas.
- Permady, G. C., Zulfikar, G., Sulistiono, A., & Laim, B. F. N. (2021). Pembentukan Karakter Kepemimpinan Pancasila di Politeknik Pelayaran Sorong (Suatu Telaah Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila). *JPB: Jurnal Patria Bahari*, 1(2), 35–45. <https://doi.org/10.54017/jpb.v1i2.41>
- Riadi, S. (2006). *Dasar Hidup Manusia Pancasila* (1st ed., Vol. 1). Aliran Kebatinan Perjalanan.
- Rosi, F., Handoko, P., & Rohmah, E. I. (2021). Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Model Kepemimpinan di Indonesia. 1(1). <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.68>
- Sarfo, J. O., & Ofori, P. K. (2017). A Book Review: Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. *Russian Journal of Sociology*, 3(1). <https://doi.org/10.13187/rjs.2017.1.30>
- Tambunan, S. (2018). Kepemimpinan pancasila: Mengelola kebhinekaan, dan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. *The Ary Suta Center*, 43, 95–132.
- Wahid, A. (2003). Menggagas Indonesia Baru: Manifestasi Pancasila. *Republika*.